



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 8 TAHUN 2019

TANGGAL : 24 JULI 2019

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018**



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 9) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 93);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 berupa laporan keuangan yang memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan perubahan ekuitas, dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 24.702.318.190.582,34	
b. Belanja	<u>Rp 24.478.632.557.339,00</u>	
Surplus		Rp 223.685.633.243,34
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 1.528.916.848.598,20	
- Pengeluaran	<u>Rp 140.000.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		<u>Rp 1.388.916.848.598,20</u>
d. SiLPA		Rp 1.612.602.481.841,54

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 113.231.885.417,66 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp 24.815.550.076.000,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 24.702.318.190.582,34</u> |
| Selisih lebih | Rp * 113.231.885.417,66 |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 1.707.954.771.661,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 26.186.587.329.000,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 24.478.632.557.339,00</u> |
| Selisih kurang | (Rp 1.707.954.771.661,00) |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 1.594.722.886.243,30 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Surplus/Defisit setelah perubahan | (Rp 1.371.037.253.000,00) |
| 2. Realisasi | <u>Rp 223.685.633.243,30</u> |
| Selisih lebih | Rp 1.594.722.886.243,30 |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 17.879.595.598,20 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 1.511.037.253.000,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 1.528.916.848.598,20</u> |
| Selisih lebih | Rp 17.879.595.598,20 |

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 140.000.000.000,00
2. Realisasi	<u>Rp 140.000.000.000,00</u>
Selisih	Rp. 0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 17.879.595.598,20 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 1.371.037.253.000,00
2. Realisasi	<u>Rp 1.388.916.848.598,20</u>
Selisih lebih	Rp 17.879.595.598,20

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 1.161.037.252.508,00
b. Penggunaan tahun berjalan	(Rp 1.156.338.690.485,20)
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp 1.612.602.481.841,54
d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	<u>(Rp 4.698.562.022,80)</u>
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 1.612.602.481.841,54

Pasal 5

Neraca Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp 36.382.807.647.907,47
b. Jumlah Utang	<u>(Rp 470.345.881.167,59)</u>
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp 35.912.461.766.739,88

Pasal 6

Laporan operasional Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, sebagai berikut :

a. Pendapatan operasional	Rp 26.740.296.197.300,14
b. Belanja operasional	<u>Rp 24.826.628.352.419,18</u>
Surplus dari operasional	Rp 1.913.667.844.880,96

c. Surplus dari kegiatan non operasional	(Rp 35.066.901.024,94)
d. Surplus sebelum pos luar biasa	Rp 1.878.600.943.856,02
e. Jumlah pos luar biasa	(Rp 0,00)
f. Surplus laporan operasional	Rp 1.878.600.943.856,02

Pasal 7

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Saldo kas dan setara kas awal per 1 Januari 2018	Rp 1.163.279.517.549,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 1.892.975.114.043,34
c. Arus kas dari aktivitas Investasi aset non keuangan	(Rp 1.677.239.886.748,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp 232.578.158.113,00
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	(Rp 173.987.743,00)
f. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 616.508.425,00
g. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 43.477.500,00
h. Kas di Bendahara BLUD	Rp 2.406.735.487,00
i. Kas di Bendahara Sekolah	Rp 41.686.769.051,20
j. Setara Kas di BLUD	Rp 0,00
j. Saldo kas dan setara kas akhir per 31 Desember 2018	Rp 1.615.363.817.893,54

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp 33.824.129.032.178,70
b. Surplus-LO	Rp 1.878.600.943.856,02
c. RK-PPKD	(Rp 0,00)
d. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp 209.731.790.704,16
e. Ekuitas akhir	Rp 35.912.461.766.739,88

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran.
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3. : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4. : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III : Laporan Operasional
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Juli 2019
GUBERNUR JAWA TENGAH,



Diundangkan di Semarang
pada tanggal 24 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,



SEKRETARIS DAERAH KARTO SOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR: 8-155/2019

URUSAN PEMERINTAHAN : ADMINISTRASI UMUM
ORGANISASI : SKPKD
SUB. UNIT ORGANISASI : SKPKD

KODE REKENING	URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		BERTAMBAH (BERKURANG)		P E N J E L A S A N
			Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5=4/3x100	6=4-3	7=6/3X100	8
4.01 4 01 00 00 00 4	PENDAPATAN	11,418,777,415,000	11,002,457,894,999	68,997.06	(416,319,520,001)	8.72	
4.01 4 01 00 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	11,975,742,266	0	11,975,742,266	0	
4.01 4 01 00 00 00 4 1 4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	0	11,975,742,266	0	11,975,742,266	0	
4.01 4 01 00 00 00 4 1 4 04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	0	12,700,000	0	12,700,000	0	
4.01 4 01 00 00 00 4 1 4 04 02	Kerugian Barang	0	12,700,000	0	12,700,000	0	
4.01 4 01 00 00 00 4 1 4 06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	2,281,614,797	0	2,281,614,797	0	
4.01 4 01 00 00 00 4 1 4 06 13	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	2,281,614,797	0	2,281,614,797	0	
4.01 4 01 00 00 00 4 1 4 10	Pendapatan Dari Pengembalian	0	7,707,921,585	0	7,707,921,585	0	
4.01 4 01 00 00 00 4 1 4 10 03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0	810,735,242	0	810,735,242	0	
4.01 4 01 00 00 00 4 1 4 10 06	Pendapatan dari Pengembalian Belanja Tahun Lalu	0	5,774,124,175	0	5,774,124,175	0	
4.01 4 01 00 00 00 4 1 4 10 07	Pendapatan dari Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas	0	1,123,062,168	0	1,123,062,168	0	
4.01 4 01 00 00 00 4 1 4 18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0	1,973,505,884	0	1,973,505,884	0	
4.01 4 01 00 00 00 4 1 4 18 02	Penerimaan lain-lain SKPD	0	1,973,505,884	0	1,973,505,884	0	
4.01 4 01 00 00 00 4 2	DANA PERIMBANGAN	11,363,269,415,000	10,933,776,831,696	96.22	(429,492,583,304)	(3.78)	
4.01 4 01 00 00 00 4 2 1	BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	954,366,898,000	769,449,921,024	80.62	(184,916,976,976)	(19.38)	
4.01 4 01 00 00 00 4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak	946,959,236,000	760,737,570,218	80.33	(186,221,665,782)	(19.67)	
4.01 4 01 00 00 00 4 2 1 01 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	60,246,912,000	63,026,027,692	104.61	2,779,115,692	4.61	
4.01 4 01 00 00 00 4 2 1 01 03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	683,633,895,000	493,828,217,226	72.24	(189,805,677,774)	(27.76)	
4.01 4 01 00 00 00 4 2 1 01 06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	203,078,429,000	203,883,325,300	100.4	804,896,300	0.4	
4.01 4 01 00 00 00 4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7,407,662,000	8,712,350,806	117.61	1,304,688,806	17.61	
4.01 4 01 00 00 00 4 2 1 02 02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	3,870,290,000	3,400,440,964	87.86	(469,849,036)	(12.14)	
4.01 4 01 00 00 00 4 2 1 02 08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	77,530,000	654,837,184	844.62	577,307,184	744.62	
4.01 4 01 00 00 00 4 2 1 02 09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	3,093,537,000	4,200,405,208	135.78	1,106,868,208	35.78	
4.01 4 01 00 00 00 4 2 1 02 10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	366,305,000	456,667,450	124.67	90,362,450	24.67	
4.01 4 01 00 00 00 4 2 1 02 11	Bagi Hasil Dari Minerba	0	0	0	0	0	
4.01 4 01 00 00 00 4 2 2	DANA ALOKASI UMUM	3,652,586,431,000	3,652,586,431,000	100	0	0	
4.01 4 01 00 00 00 4 2 2 01	Dana Alokasi Umum	3,652,586,431,000	3,652,586,431,000	100	0	0	
4.01 4 01 00 00 00 4 2 2 01 01	Dana Alokasi Umum	3,652,586,431,000	3,652,586,431,000	100	0	0	

KODE REKENING	URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		BERTAMBAH (BERKURANG)		P E N J E L A S A N
			Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5=4/3x100	6=4-3	7=6/3X100	8
4.0140100000423	DANA ALOKASI KHUSUS	6,756,316,086,000	6,511,740,479,672	96.38	(244,575,606,328)	(3.62)	
4.014010000042302	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	300,490,000,000	267,575,436,659	89.05	(32,914,563,341)	(10.95)	
4.01401000004230201	DAK Bidang Pendidikan	137,159,000,000	127,757,334,206	93.15	(9,401,665,794)	(6.85)	
4.01401000004230202	DAK Bidang Kesehatan	91,189,000,000	83,219,727,177	91.26	(7,969,272,823)	(8.74)	
4.01401000004230203	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	22,789,000,000	17,652,080,000	77.46	(5,136,920,000)	(22.54)	
4.01401000004230204	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	5,734,000,000	4,733,754,000	82.56	(1,000,246,000)	(17.44)	
4.01401000004230208	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	10,025,000,000	7,586,293,376	75.67	(2,438,706,624)	(24.33)	
4.01401000004230209	DAK Bidang Pertanian	17,182,000,000	14,451,149,400	84.11	(2,730,850,600)	(15.89)	
4.01401000004230212	DAK Bidang Kehutanan	12,464,000,000	9,305,233,600	74.66	(3,158,766,400)	(25.34)	
4.01401000004230220	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pariwisata	3,396,000,000	2,377,488,400	70.01	(1,018,511,600)	(29.99)	
4.01401000004230221	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Energi Sumber Daya Mineral	552,000,000	492,376,500	89.2	(59,623,500)	(10.8)	
4.014010000042303	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	6,455,826,086,000	6,244,165,043,013	96.72	(211,661,042,987)	(3.28)	
4.01401000004230301	Bantuan Operasional Sekolah	5,419,435,200,000	5,204,476,040,000	96.03	(214,959,160,000)	(3.97)	
4.01401000004230304	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1,025,317,889,000	1,028,894,671,500	100.35	3,576,782,500	0.35	
4.01401000004230306	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BOK dan BOKB)	3,640,458,000	3,640,458,000	100	0	0	
4.01401000004230307	Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan	3,000,000,000	2,975,310,100	99.18	(24,689,900)	(0.82)	
4.01401000004230309	Bantuan Kependudukan dan Catatan Sipil	4,432,539,000	4,178,563,413	94.27	(253,975,587)	(5.73)	
4.014010000043	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	55,508,000,000	56,705,321,037	102.16	1,197,321,037	2.16	
4.0140100000431	PENDAPATAN HIBAH	22,008,000,000	22,008,000,000	100	0	0	
4.014010000043103	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	22,008,000,000	22,008,000,000	100	0	0	
4.01401000004310304	Penerimaan dari Pihak Ketiga Jasa Raharja	22,008,000,000	22,008,000,000	100	0	0	
4.0140100000433	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	0	1,197,321,037	0	1,197,321,037	0	
4.014010000043305	Dana Bagi hasil Lainnya	0	1,197,321,037	0	1,197,321,037	0	
4.01401000004330501	Dana Bagi hasil Lainnya	0	1,197,321,037	0	1,197,321,037	0	
4.0140100000437	DANA INSENTIF DAERAH	33,500,000,000	33,500,000,000	100	0	0	
4.014010000043701	Dana Insentif Daerah	33,500,000,000	33,500,000,000	100	0	0	
4.01401000004370101	Penerimaan Penghargaan Prestasi Kinerja Keuangan Daerah Terbaik Nasional	33,500,000,000	33,500,000,000	100	0	0	

KODE REKENING										URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		BERTAMBAH (BERKURANG)		P E N J E L A S A N
												Rp	%	Rp	%	
1										2	3	4	5=4/3x100	6=4-3	7=6/3X100	8
4.01 4 01 00 00 00 5										BELANJA	13,085,867,050,000	12,285,913,030,005	93.89	(799,954,019,995)	(6.11)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1										BELANJA TIDAK LANGSUNG	13,085,867,050,000	12,285,913,030,005	93.89	(799,954,019,995)	(6.11)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1 4										BELANJA HIBAH	5,667,713,173,000	5,150,000,983,920	90.87	(517,712,189,080)	(9.13)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1 4 01										Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	859,144,017,000	691,787,098,573	80.52	(167,356,918,427)	(19.48)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1 4 01 01										Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	859,144,017,000	691,787,098,573	80.52	(167,356,918,427)	(19.48)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1 4 05										Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	128,424,707,000	117,121,643,000	91.2	(11,303,064,000)	(8.8)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1 4 05 01										Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	128,424,707,000	117,121,643,000	91.2	(11,303,064,000)	(8.8)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1 4 07										Belanja Hibah Dana BOS	4,680,144,449,000	4,341,092,242,347	92.76	(339,052,206,653)	(7.24)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1 4 07 02										Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Semarang	119,332,451,000	111,802,208,798	93.69	(7,530,242,202)	(6.31)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1 4 07 03										Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Kendal	133,961,385,000	127,752,449,462	95.37	(6,208,935,538)	(4.63)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1 4 07 04										Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Demak	130,342,887,000	122,096,440,000	93.67	(8,246,447,000)	(6.33)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1 4 07 05										Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Grobogan	189,150,174,000	175,913,960,000	93	(13,236,214,000)	(7)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1 4 07 06										Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Pati	143,073,817,000	134,287,180,000	93.86	(8,786,637,000)	(6.14)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1 4 07 07										Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Kudus	98,429,626,000	92,298,664,383	93.77	(6,130,961,617)	(6.23)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1 4 07 08										Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Jepara	128,576,857,000	120,079,945,395	93.39	(8,496,911,605)	(6.61)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1 4 07 09										Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Rembang	73,525,883,000	67,989,800,000	92.47	(5,536,083,000)	(7.53)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1 4 07 10										Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Blora	122,395,650,000	112,600,960,000	92	(9,794,690,000)	(8)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1 4 07 11										Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Pekalongan	117,808,405,000	108,301,000,000	91.93	(9,507,405,000)	(8.07)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1 4 07 12										Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Batang	90,017,159,000	85,326,390,000	94.79	(4,690,769,000)	(5.21)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1 4 07 13										Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Pemalang	214,404,706,000	195,903,780,000	91.37	(18,500,926,000)	(8.63)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1 4 07 14										Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Tegal	200,013,324,000	188,022,308,241	94	(11,991,015,759)	(6)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1 4 07 15										Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Brebes	244,083,479,000	226,168,314,972	92.66	(17,915,164,028)	(7.34)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1 4 07 16										Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Banyumas	240,997,310,000	229,697,892,293	95.31	(11,299,417,707)	(4.69)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1 4 07 17										Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Cilacap	268,642,076,000	242,584,815,953	90.3	(26,057,260,047)	(9.7)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1 4 07 18										Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Purbalingga	115,821,546,000	106,644,660,000	92.08	(9,176,886,000)	(7.92)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1 4 07 19										Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Banjarnegara	115,560,822,000	107,120,680,000	92.7	(8,440,142,000)	(7.3)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1 4 07 20										Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Magelang	147,702,971,000	141,331,632,994	95.69	(6,371,338,006)	(4.31)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1 4 07 21										Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Temanggung	88,726,031,000	83,888,850,000	94.55	(4,837,181,000)	(5.45)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1 4 07 22										Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Wonosobo	107,471,337,000	100,002,800,000	93.05	(7,468,537,000)	(6.95)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1 4 07 23										Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Purworejo	110,646,161,000	101,471,608,908	91.71	(9,174,552,092)	(8.29)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1 4 07 24										Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Kebumen	190,733,255,000	175,063,015,000	91.78	(15,670,240,000)	(8.22)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1 4 07 25										Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Klaten	159,906,209,000	149,627,113,081	93.57	(10,279,095,919)	(6.43)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1 4 07 26										Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Boyolali	112,948,549,000	107,364,235,954	95.06	(5,584,313,046)	(4.94)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1 4 07 27										Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Sragen	129,019,523,000	119,115,440,000	92.32	(9,904,083,000)	(7.68)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1 4 07 28										Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Sukoharjo	109,384,250,000	101,954,700,307	93.21	(7,429,549,693)	(6.79)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1 4 07 29										Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Karanganyar	115,348,053,000	108,293,240,000	93.88	(7,054,813,000)	(6.12)	
4.01 4 01 00 00 00 5 1 4 07 30										Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Wonogiri	130,845,393,000	118,671,985,276	90.7	(12,173,407,724)	(9.3)	

KODE REKENING											URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK		JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		BERTAMBAH (BERKURANG)		P E N J E L A S A N	
														Rp	%	Rp	%		
1											2		3	4	5=4/3x100	6=4-3	7=6/3X100	8	
4.01	4	01	00	00	00	5	1	4	07	31	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Semarang		251,960,340,000	224,830,881,028	89.23	(27,129,458,972)	(10.77)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	4	07	32	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Pekalongan		41,481,657,000	37,420,600,000	90.21	(4,061,057,000)	(9.79)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	4	07	33	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Surakarta		121,640,278,000	111,024,612,302	91.27	(10,615,665,698)	(8.73)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	4	07	34	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Salatiga		35,464,260,000	33,022,198,000	93.11	(2,442,062,000)	(6.89)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	4	07	35	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Tegal		48,276,994,000	44,222,700,000	91.6	(4,054,294,000)	(8.4)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	4	07	36	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Magelang		32,451,631,000	29,195,180,000	89.97	(3,256,451,000)	(10.03)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	5			BELANJA BANTUAN SOSIAL		45,211,750,000	41,572,950,000	91.95	(3,638,800,000)	(8.05)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	5	05		Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan Masyarakat		45,211,750,000	41,572,950,000	91.95	(3,638,800,000)	(8.05)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	5	05	01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan Masyarakat		45,211,750,000	41,572,950,000	91.95	(3,638,800,000)	(8.05)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	6			BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA		5,101,505,174,000	4,971,230,606,896	97.45	(130,274,567,104)	(2.55)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	6	02		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota		5,101,505,174,000	4,971,230,606,896	97.45	(130,274,567,104)	(2.55)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	6	02	02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Semarang		159,273,644,000	159,266,165,193	100	(7,478,807)	0.00		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	6	02	03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kendal		146,133,291,000	140,158,850,805	95.91	(5,974,440,195)	(4.09)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	6	02	04	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Demak		150,361,062,000	149,924,806,126	99.71	(436,255,874)	(0.29)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	6	02	05	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Grobogan		158,370,660,000	158,364,275,355	100	(6,384,645)	0.00		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	6	02	06	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pati		180,863,865,000	180,855,109,592	100	(8,755,408)	0.00		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	6	02	07	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kudus		144,043,891,000	143,740,960,128	99.79	(302,930,872)	(0.21)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	6	02	08	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Jepara		156,530,889,000	155,718,324,514	99.48	(812,564,486)	(0.52)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	6	02	09	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Rembang		106,383,178,000	105,216,144,949	98.9	(1,167,033,051)	(1.1)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	6	02	10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Blora		106,593,053,000	102,733,000,522	96.38	(3,860,052,478)	(3.62)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	6	02	11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pekalongan		108,553,105,000	106,948,792,091	98.52	(1,604,312,909)	(1.48)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	6	02	12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Batang		109,103,304,000	104,708,728,793	95.97	(4,394,575,207)	(4.03)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	6	02	13	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pemalang		147,080,597,000	147,074,253,877	100	(6,343,123)	0.00		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	6	02	14	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Tegal		169,790,603,000	165,313,217,499	97.36	(4,477,385,501)	(2.64)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	6	02	15	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Brebes		189,581,100,000	183,007,975,496	96.53	(6,573,124,504)	(3.47)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	6	02	16	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Banyumas		216,458,873,000	211,522,699,165	97.72	(4,936,173,835)	(2.28)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	6	02	17	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Cilacap		211,894,535,000	205,307,032,257	96.89	(6,587,502,743)	(3.11)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	6	02	18	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Purbalingga		110,594,125,000	107,679,644,371	97.36	(2,914,480,629)	(2.64)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	6	02	19	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Banjarnegara		105,719,440,000	104,796,773,471	99.13	(922,666,529)	(0.87)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	6	02	20	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Magelang		158,830,235,000	154,791,322,105	97.46	(4,038,912,895)	(2.54)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	6	02	21	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Temanggung		99,190,940,000	94,537,698,462	95.31	(4,653,241,538)	(4.69)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	6	02	22	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Wonosobo		98,719,231,000	96,070,560,600	97.32	(2,648,670,400)	(2.68)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	6	02	23	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Purworejo		100,883,656,000	95,800,755,575	94.96	(5,082,900,425)	(5.04)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	6	02	24	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kebumen		133,150,361,000	133,143,854,746	100	(6,506,254)	0.00		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	6	02	25	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Klaten		175,907,323,000	175,902,080,227	100	(5,242,773)	0.00		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	6	02	26	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Boyolali		127,486,050,000	127,480,524,105	100	(5,525,895)	0.00		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	6	02	27	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sragen		145,355,720,000	142,517,743,025	98.05	(2,837,976,975)	(1.95)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	6	02	28	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sukoharjo		153,478,563,000	145,714,090,427	94.94	(7,764,472,573)	(5.06)		

KODE REKENING											URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK		JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		BERTAMBAH (BERKURANG)		PENJELASAN	
														Rp	%	Rp	%		
1											2		3	4	5=4/3x100	6=4-3	7=6/3X100	8	
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	02	30	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Wonogiri		43,962,190,000	42,971,440,000	97.75	(990,750,000)	(2.25)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	02	31	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Semarang		46,541,600,000	34,937,506,000	75.07	(11,604,094,000)	(24.93)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	02	32	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Pekalongan		7,826,600,000	7,324,841,000	93.59	(501,759,000)	(6.41)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	02	33	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Surakarta		25,086,600,000	24,128,135,273	96.18	(958,464,727)	(3.82)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	02	34	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Salatiga		2,791,600,000	2,668,788,000	95.6	(122,812,000)	(4.4)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	02	35	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Tegal		19,511,600,000	16,547,670,595	84.81	(2,963,929,405)	(15.19)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	02	36	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Magelang		4,076,600,000	3,916,290,000	96.07	(160,310,000)	(3.93)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	03		Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa		928,930,766,000	894,477,765,980	96.29	(34,453,000,020)	(3.71)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	03	02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Semarang		34,314,790,000	34,174,790,000	99.59	(140,000,000)	(0.41)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	03	03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Kendal		36,321,459,000	35,981,459,000	99.06	(340,000,000)	(0.94)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	03	04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Demak		18,168,323,000	18,013,322,980	99.15	(155,000,020)	(0.85)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	03	05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Grobogan		74,441,638,000	73,126,638,000	98.23	(1,315,000,000)	(1.77)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	03	06	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Pati		99,337,002,000	97,212,002,000	97.86	(2,125,000,000)	(2.14)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	03	07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Kudus		11,415,000,000	9,565,000,000	83.79	(1,850,000,000)	(16.21)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	03	08	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Jepara		33,473,105,000	33,273,105,000	99.4	(200,000,000)	(0.6)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	03	09	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Rembang		18,360,000,000	18,310,000,000	99.73	(50,000,000)	(0.27)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	03	10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Blora		21,958,000,000	21,958,000,000	100	0	0		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	03	11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Pekalongan		17,265,000,000	16,000,000,000	92.67	(1,265,000,000)	(7.33)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	03	12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Batang		37,445,808,000	36,995,808,000	98.8	(450,000,000)	(1.2)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	03	13	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Pemalang		23,723,756,000	22,063,756,000	93	(1,660,000,000)	(7)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	03	14	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Tegal		15,705,000,000	12,535,000,000	79.82	(3,170,000,000)	(20.18)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	03	15	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Brebes		39,960,000,000	37,570,000,000	94.02	(2,390,000,000)	(5.98)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	03	16	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Banyumas		37,959,920,000	37,239,920,000	98.1	(720,000,000)	(1.9)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	03	17	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Cilacap		28,367,822,000	27,642,822,000	97.44	(725,000,000)	(2.56)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	03	18	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Purbalingga		16,280,000,000	15,340,000,000	94.23	(940,000,000)	(5.77)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	03	19	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Banjarnegara		27,368,671,000	25,928,671,000	94.74	(1,440,000,000)	(5.26)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	03	20	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Magelang		39,631,417,000	39,021,417,000	98.46	(610,000,000)	(1.54)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	03	21	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Temanggung		30,341,413,000	29,811,413,000	98.25	(530,000,000)	(1.75)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	03	22	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Wonosobo		35,197,500,000	34,837,500,000	98.98	(360,000,000)	(1.02)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	03	23	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Purworejo		28,215,000,000	27,825,000,000	98.62	(390,000,000)	(1.38)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	03	24	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Kebumen		29,120,000,000	23,025,000,000	79.07	(6,095,000,000)	(20.93)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	03	25	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Klaten		58,095,000,000	54,455,000,000	93.73	(3,640,000,000)	(6.27)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	03	26	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Boyolali		18,855,000,000	17,255,000,000	91.51	(1,600,000,000)	(8.49)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	03	27	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Sragen		29,146,142,000	28,826,142,000	98.9	(320,000,000)	(1.1)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	03	28	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Sukoharjo		10,875,000,000	10,665,000,000	98.07	(210,000,000)	(1.93)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	03	29	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Karanganyar		23,371,000,000	22,341,000,000	95.59	(1,030,000,000)	(4.41)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	03	30	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Wonogiri		34,218,000,000	33,485,000,000	97.86	(733,000,000)	(2.14)		
4.01	4	01	00	00	00	5	1	7	04		Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya		8,892,200,000	8,855,572,500	99.59	(36,627,500)	(0.41)		

KODE REKENING										URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK		JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		BERTAMBAH (BERKURANG)		PENJELASAN	
													Rp	%	Rp	%		
1										2		3	4	5=4/3x100	6=4-3	7=6/3X100	8	
4.01	4	01	00	00	00	00	6			PEMBIAYAAN DAERAH		1,371,037,253,000	1,366,614,114,110	99.73	(4,423,138,890)	(0.27)		
4.01	4	01	00	00	00	00	6	1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		1,511,037,253,000	1,506,614,114,110	99.71	(4,423,138,890)	(0.29)		
4.01	4	01	00	00	00	00	6	1	1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA		1,161,037,253,000	1,156,338,690,485	99.6	(4,698,562,515)	(0.4)		
4.01	4	01	00	00	00	00	6	1	1	01	Pelampauan Penerimaan PAD	420,632,960,000	420,632,959,508	100	(492)	0		
4.01	4	01	00	00	00	00	6	1	1	01	Pajak Daerah	355,806,333,000	355,806,332,508	100	(492)	0		
4.01	4	01	00	00	00	00	6	1	1	01	Retribusi Daerah	5,763,472,000	5,763,472,000	100	0	0		
4.01	4	01	00	00	00	00	6	1	1	01	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-161,097,000	-161,097,000	100	0	0		
4.01	4	01	00	00	00	00	6	1	1	01	Lain-Lain PAD yang Sah	59,224,252,000	59,224,252,000	100	0	0		
4.01	4	01	00	00	00	00	6	1	1	02	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-331,891,764,000	-331,891,764,000	100	0	0		
4.01	4	01	00	00	00	00	6	1	1	02	Bagi Hasil Pajak	-160,793,540,000	-160,793,540,000	100	0	0		
4.01	4	01	00	00	00	00	6	1	1	02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1,842,558,000	1,842,558,000	100	0	0		
4.01	4	01	00	00	00	00	6	1	1	02	Dana Alokasi Khusus	-172,940,782,000	-172,940,782,000	100	0	0		
4.01	4	01	00	00	00	00	6	1	1	03	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1,377,308,000	1,377,308,000	100	0	0		
4.01	4	01	00	00	00	00	6	1	1	03	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1,377,308,000	1,377,308,000	100	0	0		
4.01	4	01	00	00	00	00	6	1	1	04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	1,070,465,984,000	1,065,767,421,977	99.56	(4,698,562,023)	(0.44)		
4.01	4	01	00	00	00	00	6	1	1	04	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	91,179,567,000	91,179,567,000	100	0	0		
4.01	4	01	00	00	00	00	6	1	1	04	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	29,329,526,000	24,630,963,977	83.98	(4,698,562,023)	(16.02)		
4.01	4	01	00	00	00	00	6	1	1	04	Belanja Barang dan Jasa	402,927,019,000	402,927,019,000	100	0	0		
4.01	4	01	00	00	00	00	6	1	1	04	Belanja Modal	139,924,136,000	139,924,136,000	100	0	0		
4.01	4	01	00	00	00	00	6	1	1	04	Belanja Hibah	145,877,493,000	145,877,493,000	100	0	0		
4.01	4	01	00	00	00	00	6	1	1	04	Belanja Bantuan Sosial	4,596,780,000	4,596,780,000	100	0	0		
4.01	4	01	00	00	00	00	6	1	1	04	Belanja Belanja Bagi Hasil	81,401,148,000	81,401,148,000	100	0	0		
4.01	4	01	00	00	00	00	6	1	1	04	Belanja Bantuan Keuangan	158,861,265,000	158,861,265,000	100	0	0		
4.01	4	01	00	00	00	00	6	1	1	04	Belanja Belanja Tidak Terduga	16,369,050,000	16,369,050,000	100	0	0		
4.01	4	01	00	00	00	00	6	1	1	07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0	0	0	0	0		
4.01	4	01	00	00	00	00	6	1	1	07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0	0	0	0	0		
4.01	4	01	00	00	00	00	6	1	1	14	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	452,765,000	452,765,000	100	0	0		
4.01	4	01	00	00	00	00	6	1	1	14	Penerimaan Pinjaman pokok Dana Bergulir	452,765,000	452,765,000	100	0	0		
4.01	4	01	00	00	00	00	6	1	2	PENCAIRAN DANA CADANGAN		350,000,000,000	350,000,000,000	100	0	0		
4.01	4	01	00	00	00	00	6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan	350,000,000,000	350,000,000,000	100	0	0		
4.01	4	01	00	00	00	00	6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan	350,000,000,000	350,000,000,000	100	0	0		
4.01	4	01	00	00	00	00	6	1	5	PENGEMBALIAN POKOK DANA PERGULIRAN		0	275,423,625	0	275,423,625	0		
4.01	4	01	00	00	00	00	6	1	5	01	Pengembalian Pokok Dana Perguliran	0	275,423,625	0	275,423,625	0		
4.01	4	01	00	00	00	00	6	1	5	01	Pengembalian Pokok Dana Perguliran	0	275,423,625	0	275,423,625	0		
4.01	4	01	00	00	00	00	6	1	8	PENERIMAAN PINJAMAN POKOK DANA TALANGAN PENGADAAN PANGAN		0	0	0	0	0		

KODE REKENING											URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK											JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		BERTAMBAH (BERKURANG)		PENJELASAN						
																							Rp	%	Rp	%							
1											2											3	4	5=4/3x100	6=4-3	7=6/3X100	8						
4.01 4 01 00 00 00 6 1 8 01											Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Talangan Pengadaan Pangan											0	0	0	0	0							
4.01 4 01 00 00 00 6 1 8 01 01											Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Talangan Pengadaan Pangan											0	0	0	0	0							
4.01 4 01 00 00 00 6 1											PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH											140,000,000,000	140,000,000,000	100	0	0							
4.01 4 01 00 00 00 6 2 2											PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH											140,000,000,000	140,000,000,000	100	0	0							
4.01 4 01 00 00 00 6 2 2 02											Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)											140,000,000,000	140,000,000,000		0								
4.01 4 01 00 00 00 6 2 2 02 04											Penyertaan Modal pada BPR - BKK											60,000,000,000	60,000,000,000	100	0	0							
4.01 4 01 00 00 00 6 2 2 02 05											Penyertaan Modal pada PDAB Tirta Utama											53,280,000,000	53,280,000,000	100	0	0							
4.01 4 01 00 00 00 6 2 2 02 07											Penyertaan Modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida											6,720,000,000	6,720,000,000	100	0	0							
4.01 4 01 00 00 00 6 2 2 02 11											Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida											20,000,000,000	20,000,000,000	100	0	0							